

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN KAMPAR  
(STUDI PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN  
PERIKANAN TAHUN 2016)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau*



**Ady Pratama**  
**NPM: 137110276**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2019**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : Adi Pratama  
NPM : 137110276  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar  
(Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan  
Perikanan Tahun 2016)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

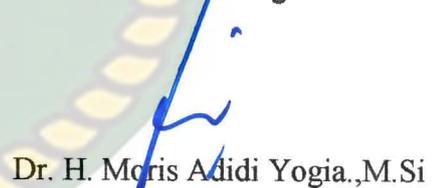
Pekanbaru, 06 April 2020

Pembimbing I



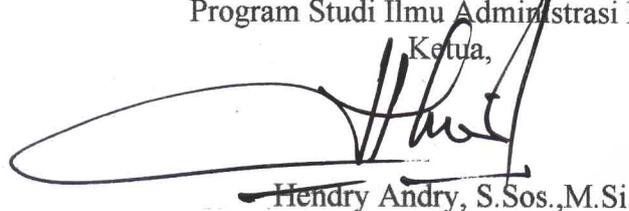
Drs. Zulkifli, M.Si

Pembimbing II



Dr. H. Morris Adidi Yogia, M.Si

Turut Menyetujui  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik  
Ketua,



Hendry Andry, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Adi Pratama  
NPM : 137110276  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar  
(Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan  
Perikanan Tahun 2016)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Ketua,

Hendry Andry, S.Sos, M.Si

Pekanbaru, 06 April 2020  
Sekretaris,

Nurmasari, S.Sos, M.Si  
Anggota,

Drs. Zulkifli, M.Si

Dia Merina Suri, S.Sos, M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 112/UIR-FS/KPTS/2019**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Ady Pratama**  
N P M : 137110276  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ( Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016 ).

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hendry Andry,S.Sos.,M.Si      | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Nurmasari.,S.Sos.,M.Si        | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. Zulkifli.,M.Si           | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Dr.H. Moris Adidi Yogia.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 5. Dia Meirina Suri.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 6. Andri Kurniawan.,BPM.,M.Si    | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 04 Desember 2019  
An. Dekan,

DR.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1.Yth. Bapak Rektor UIR
- 2.Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3.Yth. Ketua Prodi AP
- 4.A r s i p -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

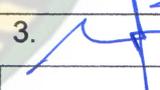
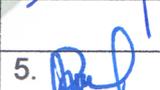
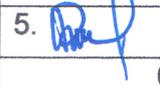
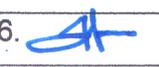
=====

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: //2. /UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 04 Des 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 05 Des 2019 jam 13.00 – 14.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ady Pratama  
NPM : 137110276  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ( Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan PERikanan Tahun 2016 ).

Nilai Ujian : Angka : " 72. " ; Huruf : " B "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hendry Andry, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Nurmasari, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. Zulkifli, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.	Anggota	4. 
5.	Dia Merina Suri, S.Sos., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Andri Kurniawan, BPM., M.Si.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 12 Desember 2019  
An. Dekan

  
**Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid Akademik

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Adi Pratama  
NPM : 137110276  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar  
(Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan  
Perikanan Tahun 2016)

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa Bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua,



Hendry Andry, S.Sos, M.Si

Pekanbaru, 06 April 2020  
Sekretaris,



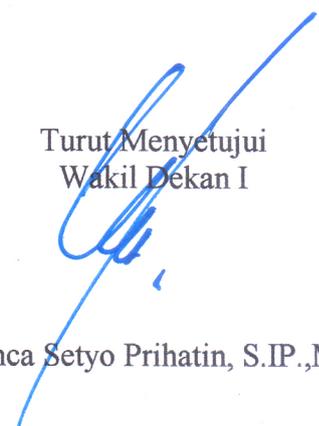
Nurmasari, S.Sos, M.Si  
Anggota,

Drs. Zulkifli, M.Si



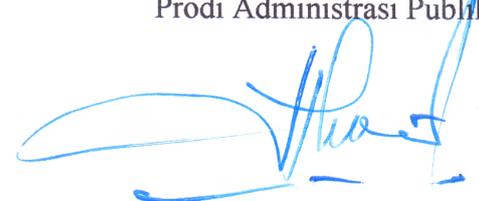
Dia Merina Suri, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui  
Wakil Dekan I



H. Panca Setyo Prihatin, S.IP.,M.Si

Prodi Administrasi Publik



Hendry Andry, S.Sos.,M.Si

## KATA PENGANTAR

Islam, kesejahteraan, kesehatan, kesabaran dan kemudahan. Sholawat serta salam hendaknya selalu tumpahruhan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **”Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016)”**.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi, pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru. Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak lain secara moril maupun materil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MC Lselaku Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru sekaligus sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu pengetahuannya yang paling berarti kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Kepada Bapak Hendry Andry, S.Sos, M.Si selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik dan seluruh staf dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya di Program Studi Ilmu Administrasi Publik.

4. Kepada Bapak Drs. Zulkifli, M.Siselaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu pengetahuannya yang paling berarti kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada Ayahanda tercinta dan ibunda tersayang yang telah memberikan kasih sayang, moril, materil, dukungan dan motivasi kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena pengetahuan dan pengalaman yang sangat terbatas. Dengan demikian kerendahan hati penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penulisan ini, semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Pekanbaru, 25 Juni 2019

Ady Pratama

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>12</b>
A. Studi Kepustakaan .....	12
1. Konsep Administrasi.....	12
2. Konsep Organisasi .....	14
3. Konsep Manajemen .....	19
4. Konsep Pelaksanaan Program.....	24
5. Konsep Penyuluh Perikanan .....	25
6. Konsep Perikanan .....	30
7. Teori Evaluasi .....	32
B. Kerangka Pikir .....	38
C. Hipotesis .....	40
D. Konsep Operasional Variabel .....	40
E. Operasional Variabel .....	41

F. Teknik Pengukuran .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Tipe Penelitian .....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Populasi dan Sampel.....	44
D. Teknik Penarikan Sampel .....	45
E. Jenis dan Sumber Data .....	46
F. Teknik Pengumpulan Data .....	46
G. Teknik Analisa Data .....	47
<b>BAB IV DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Kampar .....	48
1. Keadaan Alam.....	48
B. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar .....	49
1. Visi .....	49
2. Misi .....	50
C. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar .....	51
1. Program .....	51
2. Kegiatan .....	51
D. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar .....	55
E. Sumber Daya Manusia .....	57
F. Sarana dan Prasarana.....	57
G. Landasan Hukum .....	58
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Identitas Responden .....	61
B. Variabel dan Indikator Variabel.....	63
1. Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar .....	63
2. Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan.....	65
3. Rencana dan Realisasi Program Pelatihan Pembenihan Ikan	69

4. Rekapitulasi Penilaian Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar .....	73
--	----

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	<b>77</b>
---------------------------------	-----------



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR TABEL

Tabel:	Halaman
I.1 Daftar Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	5
I.2 Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan Tahun 2016.....	7
II.I Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016).....	45
III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016).....	38
IV.1 Formasi Jabatan Tahun 2017.....	50
V.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	54
V.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Usia Terhadap Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	55
V.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	55
V.4 Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan Tahun 2016.....	57
V.5 Tanggapan Responden Terhadap Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan.....	59
V.6 Tanggapan Responden Terhadap Rencana dan Realisasi Program Pelatihan Pembenihan Ikan.....	62
V.7 Rekapitulasi Penilaian Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	67

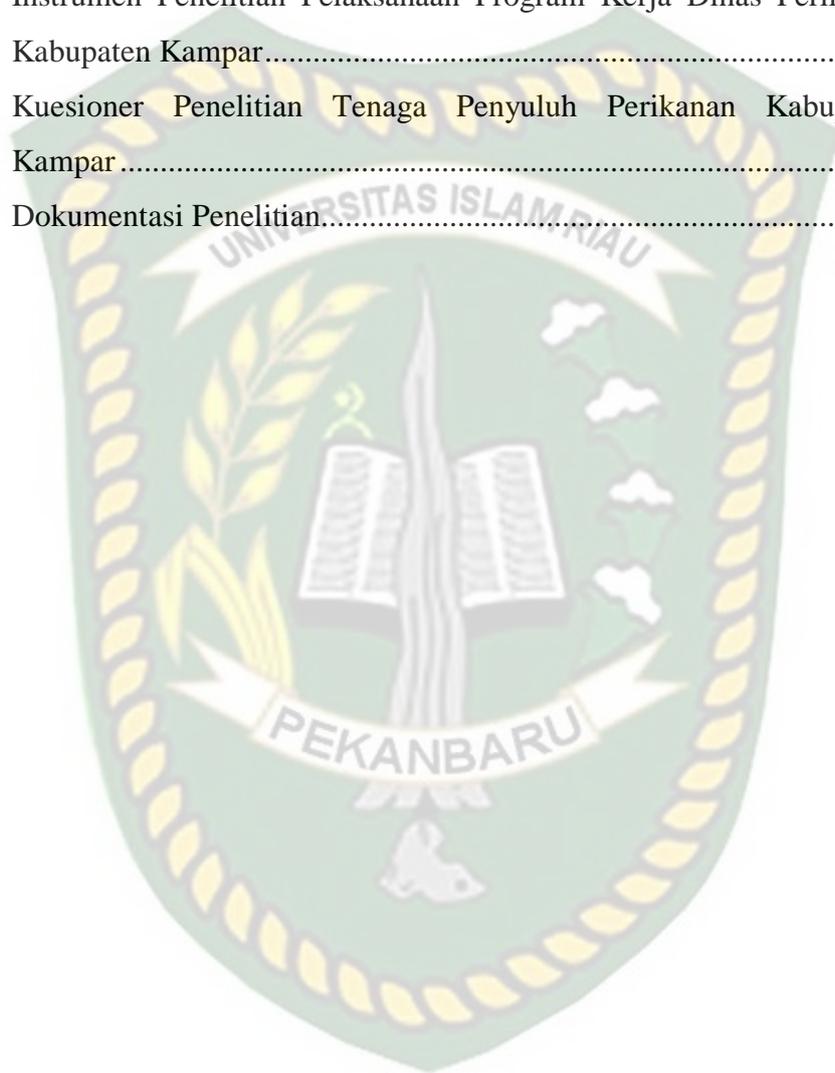
## DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016).....	38
IV.1 Peta Kabupaten Kampar.....	44
IV.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Instrumen Penelitian Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.....	73
2. Kuesioner Penelitian Tenaga Penyuluh Perikanan Kabupaten Kampar.....	77
3. Dokumentasi Penelitian.....	81



## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adi Pratama  
NPM : 137110276  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Studi program pengembangan system penyuluhan perikanan tahun 2016)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konferehensif Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihakmanapun juga.

Pekanbaru, 13 Januari 2020

Yang Menyatakan,



Ady Pratama

**PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DINAS KABUPATEN KAMPAR  
(Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016)**

**ABSTRAK**

**Oleh**

**Adi Pratama**

Lahirnya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi sebuah angin segar bagi pemerintah daerah di seluruh pelosok negeri. Undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah ini, merupakan sebuah terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca reformasi. Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliti. Dilaksanakan di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahunan 2016 tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan kuesioner serta observasi langsung kelapangan yang terdiri dari dua indikator yaitu rencana dan realisasi program pemberdayaan kelembagaan perikanan serta rencana dan realisasi program pelatihan pembenihan ikan. Hasil penelitian ini adalah dari kedua indikator terhadap pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tentang program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016, secara umum penilaian yang diperoleh adalah pada kategori penilaian cukup baik, yaitu nilai rata-rata 51 atau sebesar 43%. Selanjutnya dengan kategori penilaian baik, yaitu dengan nilai rata-rata 48,5 atau sebesar 40% dan dengan kategori penilaian tidak baik, yaitu dengan nilai rata-rata 25,5 atau sebesar 17%. Kesimpulan penelitian ini yaitu pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tentang program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016 sudah terlaksana dengan cukup baik dengan kriteria jawaban persentase antara 34% - 66%.

**Kata Kunci:** Program Kerja, Dinas Perikanan, Kabupaten Kampar

**THE IMPLEMENTATION OF THE WORKING PROGRAM OF  
KAMPAR DISTRICT OFFICE  
(A Study of 2016 Fisheries Extension Development Program System)**

**ABSTRACT**

**BY**

**Adi Pratama**

*The inception of Law No. 23 of 2014 concerning regional governance becomes a breath of fresh air for regional governments in all corners of the country. The law which gives freedom to the regional government is a breakthrough issued by the post-reform government. This type of research is a descriptive survey type because the researcher intends to provide analysis results and detailed information on the object of the researcher. Conducted at the Fisheries Office of the Kampar Regency with consideration that to find out the implementation of the work program of the Fisheries Service of the 2016 Kampar Regency. Data collection techniques was using interview and questionnaire techniques and direct observation of the field consisting of two indicators, namely the plan and realization of fisheries institutional empowerment programs and plans and realization of fish hatchery training programs. The results of this study are from the two indicators for the implementation of the Kampar District Fisheries Service work program on fisheries extension system development programs in years 2016, in general the assessment obtained was in the fairly good rating category, namely an average value of 51 or 43%. Furthermore, with a good rating category, namely with an average value of 48.5 or equal to 40% and with an unfavorable rating category, that is, with an average value of 25.5 or 17%. The conclusion of this study is that the implementation of the Kampar District Fisheries Service work program on the fisheries extension system development program in 2016 has been carried out quite well with the answer criteria percentage between 34% - 66%.*

**Keywords:** *Work Program, Fisheries District Government, Kampar Regency*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Keberadaan negara, seperti organisasi secara umum, adalah untuk memudahkan anggotanya (rakyat) mencapai tujuan bersama atau cita-citanya. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki tatanan pemerintahan yang kompleks mulai dari pusat hingga kedaerah-daerah. Tujuan dari Negara Republik Indonesia sendiri tertuang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa dan Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.

Dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, pembangunan adalah suatu aspek yang paling penting sebagai salah satu cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan di dalam Negara yang Demokrasi. Demokrasi berarti memberikan kedaulatan Negara kepada rakyat, dan tujuannya untuk menciptakan pemerintahan yang legal dan dikehendaki oleh rakyat, tujuan bangsa Indonesia itu sendiri terdapat pada Pancasila sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses untuk membenahi diri ke arah yang lebih baik, agar proses perubahan

itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya, pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah secara otonomi.

Lahirnya undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi sebuah angin segar bagi pemerintah daerah di seluruh pelosok negeri. Undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah ini, merupakan sebuah terobosan yang dikeluarkan oleh pemerintah pasca reformasi. Setelah sekian lama mengalami pasang surut melalui proses amandemen, mulai dari masa orde lama sampai pasca reformasi sekarang ini. Otonomi daerah yang kini telah berjalan selama kurang lebih empat belas tahun, masih kerap menjadi perdebatan hangat di kalangan praktisi dan kalangan ilmuwan.

Konsep daerah otonomi menurut Syafiie (2002;83) merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan dipilihnya pimpinan daerah, maka penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah.

Kampar adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar. Secara geografis, Kabupaten Kampar mempunyai letak geografis yang strategis, yang berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak disebelah utara, Kabupaten Kuantan Singingi di sebelah selatan, dan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatra Barat disebelah barat, sedangkan disebelah timur berbatasan

dengan Kabupaten Pelalawan.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Sementara itu parallel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 UU No 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki renja SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas platon anggaran sementara.

Dengan potensi yang dimiliki oleh kabupaten Kampar melalui sungai kampar, waduk buatannya dan beberapa daerah yang tanahnya cocok untuk pengembangan budidaya air tawar maka Kabupaten ini menjadi urat nadi bagi pengembangan budidaya air tawar provinsi Riau telah dijadikan sebagai kabupaten minapolitan oleh ditjen perikanan budidaya. Kabupaten Kampar adalah sekian dari Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau yang memiliki 2.112 hektar kolam ikan dan 410 kerambah sungai dan waduk. Sayangnya potensi

perikanan khususnya budidaya perikanan di Kabupaten Kampar belum tergarap maksimal. Potensi perikanan budidaya air tawar yang sangat besar.

Kampar memiliki potensi pengembangan budidaya air tawar terutama budidaya kolam, keramba dan jaring apung. Topografi Kampar juga mendukung karena memiliki banyak sungai, waduk, kolam, dan danau. Volume produksi ikan secara keseluruhan di Kampar mencapai kisaran 60 ton per hari, dan 30 ton (50%) di antaranya adalah ikan patin. Seluruh produsen adalah pembudidaya skala kecil, bukan korporasi.

Dalam hal ini pemerintah daerah, khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Kampar berperan penting terhadap pembinaan maupun pengawasan tentang usaha perikanan yang ada di kabupaten Kampar tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi dari dinas perikanan kabupaten Kampar berikut ini berdasarkan landasan hukum UU No 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 tahun 2009, kemudian peraturan pemerintah No 62 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan. Adapun tugas pokok dan fungsi dari dinas perikanan Kabupaten Kampar sebagai berikut:

**Tugas Pokok :**

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga Daerah di bidang Perikanan.
- b. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Daerah.
- c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

**Fungsi :**

- a. Petumusan kebijakan teknis dibidang perikanan dan eksplorasi kelautan.

- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang Perikanan dan eksplorasi kelautan.
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas dibidang perikanan dan kelautan yang meliputi program produksi dan konservasi prasarana usaha, eksplorasi kelautan serta unit pelaksana teknisdinas. (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2016).

Untuk mendukung pembangunan perikanan tersebut maka di Kabupaten tersebut perlu melaksanakan penyuluhan perikanan. Penyuluhan adalah sistem pendidikan non-formal yang ditujukan kepada sasaran untuk mengubah perilaku dan upaya pemberdayaan nelayan. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program penyuluhan adalah lembaga penyuluhan, jumlah dan mutu penyuluh, sasaran penyuluhan, perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian penyuluhan.

Berikut ini disajikan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2016 yang terdiri dari beberapa program dan kegiatan diantaranya:

Tabel I.1 Daftar Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2016

No	Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2016
1	Pelayanan administrasi perkantoran
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5	Pengembangan budidaya perikanan
6	Pengembangan sistem penyuluh perikanan
7	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
8	Perlindungan sumber daya hayati perikanan
9	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

(Sumber: Dokumentasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2016)

Berdasarkan data dari tahun 2016 terdapat Sembilan program kerja yang telah direncanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, hal ini harus diperhatikan bagaimana program tersebut berjalan transparan dan tidak direkayasa saat mengevaluasi untuk kegiatan ditahun selanjutnya. Pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat dinas perikanan kabupaten Kampar yang terdelegasikan secara utuh pada bidang penyuluhan dan pendampingan serta pemberdayaan masyarakat dibawah binaan dinas perikanan adalah mendukung program pembangunan sektor perikanan melalui penyuluhan, pembinaan, pendampingan secara teknis terhadap masyarakat pelaku usaha atau pelaku utama, yang bergerak dibidang perikanan.

Penyuluh dan pendampingan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, pemodalan serta terknis lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Kemudian yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan dari program kerja itu sendiri terutama pada kegiatan program pengembangan sistem penyuluh perikanan yang kurang optimal dan belum terlaksana dengan baik, berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti melalui dokumen-dokumen dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terutama pada tahun 2016 mendapatkan sedikitnya 10 kelompok yang belum terealisasi pada kegiatan

pemberdayaan lembaga perikanan serta pelatihan pembenihan ikan. Berikut ini program dan kegiatan kerja yang menjadi perhatian khusus pada penelitian ini:

Tabel I.2 Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan Tahun 2016

Program Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Realisasi
Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	- Pemberdayaan Lembaga Perikanan	- Terwujudnya kelembagaan perikanan yang kuat mandiri dan berdaya saing	40 Kelompok	30 Kelompok
	- Pelatihan Pembenihan Ikan	- Terlaksananya pelatihan pembenihan ikan	40 Kelompok	30 Kelompok

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2016.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016 dimana pada kegiatan pemberdayaan lembaga perikanan ditargetkan pencapaian kinerja sebanyak 40 kelompok tetapi pencapaian hanya pada 30 kelompok dan pada kegiatan pelatihan pembenihan ikan ditargetkan pencapaian kinerja sebanyak 40 kelompok tetapi pencapaian hanya pada 30 kelompok. Rendahnya pencapaian pada program kegiatan pengembangan sistem penyuluh perikanan diakibatkan oleh sedikitnya tenaga penyuluh perikanan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Untuk melaksanakan program-program pembangunan perikanan yang tertuang dalam Renstra, Dinas perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 06 Tahun 2008 Tentang rincian tugas seksi pelatihan dan penyuluhan mempunyai rincian tugas yaitu merumuskan dan melaksanakan pengenalan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, instansi pemerintah maupun pihak swasta, tentang pelaksanaan dan pemberdayaan program. Ini merupakan urusan wajib Dinas Perikanan Kabupaten Kampar bukan urusan pilihan.

Adapun yang menjadi fenomena dari masalah yang akan diteliti pada penelitian ini ditinjau dari berbagai aspek sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target capaian kerja yang seharusnya telah ditetapkan pada rencana kerja SKPD tahun anggaran 2016 dimana pada kegiatan pemberdayaan lembaga perikanan ditargetkan pencapaian kinerja sebanyak 40 kelompok tetapi pencapaian hanya pada 30 kelompok dan pada kegiatan pelatihan pembenihan ikan ditargetkan pencapaian kinerja sebanyak 40 kelompok tetapi pencapaian hanya pada 30 kelompok. Rendahnya pencapaian pada program kegiatan program pengembangan sistem penyuluh perikanan diakibatkan oleh sedikitnya tenaga penyuluh perikanan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sehingga target pencapaian menjadi tidak terealisasikan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan dan usaha budidaya perikanan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu untuk mengoptimalkan lahan usahanya pada

bidang perikanan. (Sumber: Dokumen Renja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2016)

3. Terbatasnya modal dalam mengembangkan usaha perikanan. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Kampar memberikan tambahan modal dan meninjau kembali mengenai pemodal dalam usaha perikanan yang mana secara demografis lokasi Kampar berpotensi untuk mengembangkan usaha perikanan. (Sumber: Dokumen Renja SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2016)

Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Kampar jumlah penyuluh PNS saat ini hanya 4 orang, hal ini dirasakan masih sangat kurang untuk pembinaan, pendampingan pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Kampar. Salah satu upaya untuk memenuhi kekurangan tenaga penyuluh tersebut yaitu dengan mengangkat Tenaga pendamping teknis yang tercantum pada peraturan oemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, serta penyuluh perikanan pada pasal 42 ayat (2). Oleh karena itu pemerintah kabupaten Kampar perlu meningkatkan lagi sistem penyuluh perikanan ini dalam program pengembangan sistem penyuluh perikanan.

Adapun pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan dari pra riset yang telah peneliti lakukan sebelumnya yang melihat ada beberapa kendala dan belum tereliasasikan pelaksanaan program kerja yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada tahun 2016, dan alasan mengambil tahun 2016 karena pada tahun itulah dimana Dinas Perikanan Kabupaten Kampar belum optimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. Oleh

karena itu penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dengan judul **"Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016)"**

### **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan program pengembangan sistem penyuluhan perikanan tahun 2016. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

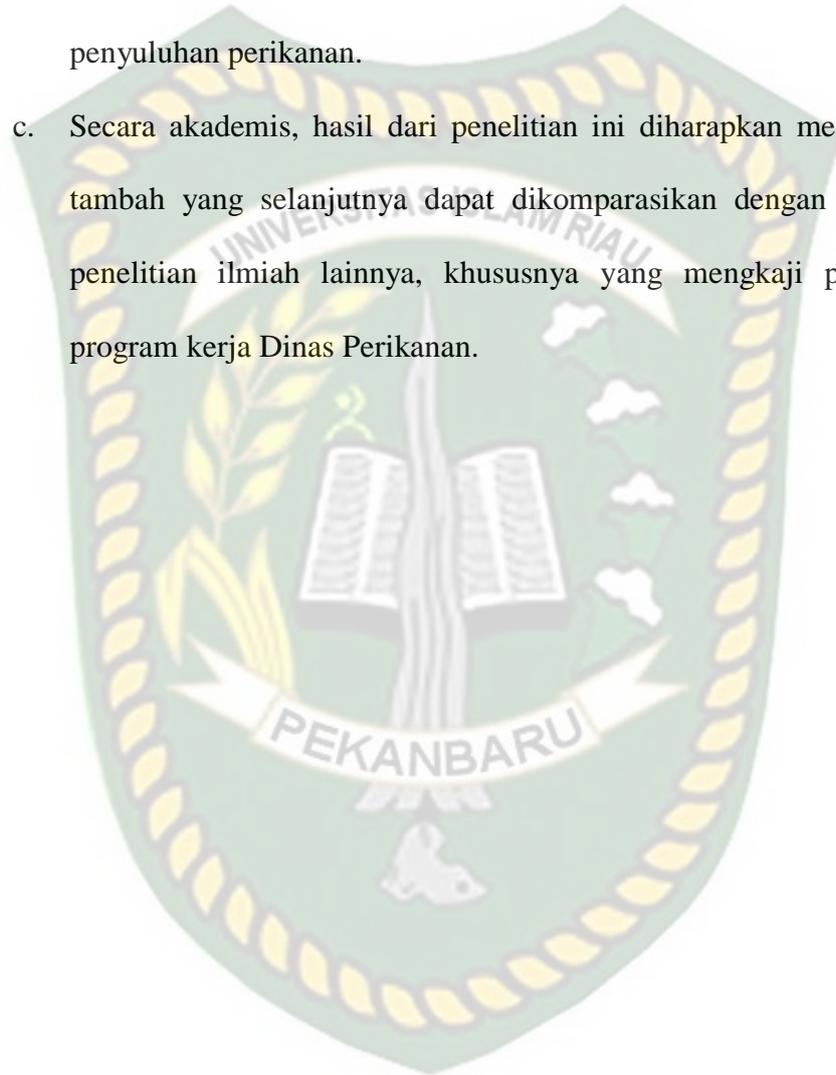
- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Administrasi Negara.

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam melaksanakan program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
- c. Secara akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Administrasi merupakan suatu proses kerja sama, aktivitas dilakukan didalam suatu komponen diawali menetapkan suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan proses kerja sama dan saling berkaitan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan, dengan kata lain administrasi adalah manusia/orang yang beraktivitas dalam suatu organisasi atau komponen untuk mencapai tujuan yang sama. Kemajuan dan keberhasilan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya niscaya dicapai melalui organisasi sedangkan manajemen suatu proses adalah serangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber daya yang ada.

Administrasi Publik sebagai salah satu ilmu yang dianalogikan sebagai ilmu terapan dalam ilmu sosial atau disebut juga dengan *social engineering*, merupakan cabang ilmu sosial dan politik di Indonesia, ilmu ini berkembang pertama kali di amerika sebagai kepanjangan ilmu administrasi bisnis. Woodrow Wilson sebagai *founding father* dari ilmu administrasi publik melihat bagaimana menjalankan Negara dengan prinsip-prinsip yang ada seperti dilakukan dalam administrasi bisnis. menjalankan pemerintahan dengan keprofesionalitasan, namun dalam perjalanannya administrasi publik tidak dapat lepas dari politik sebagai bagian dari dinamika publik.

Politik sendiri adalah alat untuk mencapai tujuan dari kekuasaan dalam administrasi publik. Alat kekuasaan ini dapat digunakan sebagai kebaikan atau juga sebagai keburukan (malapetaka). Ilmu administrasi publik adalah ilmu yang sangat multi dimensi sesuai dengan perkembangan zamannya.

Menurut The Liang Gie Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh segenap orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu dalam Zulkifli & Yogia 2014;14)

Menurut William H. Newman Administrasi adalah sebagai petunjuk bagi seseorang dalam memimpin dan mengontrol dari suatu kelompok atau individu untuk mencapai sejumlah tujuan (dalam Zulkifli, 2009;12)

Menurut Prajudi Atmusudirjo (1982;272) dalam buku administrasi dan manajemen umum menerangkan bahwa administrasi publik adalah administrasi dari Negara sebagai organisasi dan administrasi yang mengajarkan tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan.

Administrasi menurut Siagian (2014;3) administrasi ialah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Adapun ciri-ciri administrasi menurut Thoha (2008;36-38) yang dapat dipergunakan untuk membedakan secara jelas dengan instansi-instansi lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

- 1) Administrasi Negara adalah suatu kegiatan yang tidak bisa dihindari (*navoidable*).
- 2) Administrasi Negara memerlukan adanya kepatuhan.
- 3) Administrasi Negara mempunyai prioritas.
- 4) Administrasi Negara mempunyai ukuran yang tidak terbatas.
- 5) Pemimpin atasannya (top management) bersifat politis.

- 6) Pelaksanaan administrasi Negara adalah sangat sulit diukur.
- 7) Terdapat dua standar penilaian tentang administrasi Negara sangat diharapkan oleh masyarakat menghandaki administrasi Negara berbuat banyak untuk memenuhi kebutuhan mereka dan administrasi Negara mempunyai kebutuhan mereka dan administrasi Negara mempunyai kemampuan,keahlian,dana sumber-sumber lain yang terbatas.

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa pada buku administrasi desa. (dalam Nurcholis 2011:155)

Penulis menyimpulkan bahwa administrasi publik sebagai organisasi yang dibentuk oleh publik dengan aturan yang mengikatnya secara keseluruhan yang memiliki peran dalam membangun pemerintahan itu sendiri, masyarakat serta sector swasta (partakelir), administrasi menjadi peran penting dalam menjalankan fungsi dari pelaksanaan Badan Musyawarat Nagari, dimana administrasi lah yang menjadi mediator penggerak dari Badan Musyawarat Nagari.

## **2. Konsep Organisasi**

Menurut James D. Mooney menyatakan, organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (dalam Zulkifli & Nurmasari 2015;99)

Chester I. Bernard Memberikan pengertian organisasi yaitu suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (dalam Zulkifli & Nurmasari 2015;99)

Menurut Victor A. Thompson menyatakan bahwa suatu organisasi adalah suatu intergrasi dari sejumlah spesialis-spesialis yang bekerja sama sangat

rasional dan impersonal untuk mencapai beberapa tujuan spesifik yang telah diumumkan sebelumnya (dalam Thoha 2003;125)

Paul C. Bartholomew Organisasi adalah suatu susunan yang agaknya logis dari bagian-bagian yang saling tergantung untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bersatupadu dengan mana kekuasaan dan kontrol dapat dilaksanakan dengan tujuan yang mencapai suatu maksud tertentu (dalam Sutarto2002:31)

MenurutMax WebberPandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh, Kerjasama adalah suatu tata hubungan sosial yang berhubungan dan dibatasi oleh aturan-aturan. Aturan-aturan ini sejauh mungkin dapat memaksa seseorang untuk melakukan kerja sebagai suatu fungsinya yang ajek, baik dilakukan oleh pimpinan maupun oleh pegawai-pegawai administrasi lainnya (dalam Thoha2003;127)

Aspek pengertian yang dikemukakan oleh Webber ini adalah bahwa suatu organisasi atau kelompok kerjasama ini mempunyai unsur-unsur properties sebagai berikut :

- a. Organisasi merupakan tata hubungan sosial. Dalam hal ini seseorang individu melakukan proses interaksi sesamanya di dalam organisasi tertentu.
- b. Organisasi mempunyai batasan-batasan tertentu. Dengan demikian seseorang individu yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak didasarkan atas kemauan sendiri. Akan tetapi mereka dibatasi oleh peraturan-peraturan tertentu.
- c. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan yang bias membedakan suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan kemasyarakatan. Tata aturan ini menyusun proses integrasi di antara orang-orang yang bekerjasama di dalamnya, sehingga interaksi tersebut tidak begitu saja.
- d. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang didalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja untuk menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah terdapatnya hirarki. Konsekuensi dari adanya hirarki ialah bahwa di dalamnya organisai ada pimpinan atau Kepala dan bawahan atau staf.

Menurut Bernard (dalam Thoha2003;128) menyatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang koordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih. Dengan demikian Bernard menyumbangkan pendapatnya mengenai unsur kekayaan suatu organisasi, antara lain :

- a. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang di capai lewat suatu proses kesadaran, kesengajaan dan koordinasi yang bersasaran.
- b. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang bersasaran tersebut.
- c. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama dengan anggota-anggota lainnya. Dalam hal ini Bernard menekankan peranan seseorang dalam organisasi, diantaranya ada sebagian anggota yang harus diberi informasi atas motivasi dan sebagian lainnya yang harus membuat keputusan.

Organisasi adalah suatu struktur formal dan stabil yang membutuhkan sumber daya lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan output atau pengeluaran. Organisasi merupakan bentuk formal karna mereka merupakan entitas legal dan harus mematuhi ketentuan yang berlaku. Kemudian mengemukakan karakteristik struktur organisasi(Husein dan Wibowo 2006;44 ) adalah :

- a. Pembagian tugas yang jelas.
- b. Hirarki
- c. Aturan dan prosedur yang jelas
- d. Perkembangan yang tidak terpisah-pisah
- e. Kualifikasi posisi teknis
- f. Efisiensi organisasi yang maksimal

Menurut Thoha (2003;131) Organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektifitas orang-orang yang bekerja sama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Kolektifitas tersebut berstruktur, terbatas dan beridentitas yang dapat dibedakan dengan kolektifitas-kolektifitas lainnya.

#### Administrasi Pemerintahan Desa

Keberadaan administrasi pemerintahan atau administrasi negara tanpa adanya hubungan kerjasama dan koordinasi baik internal suatu organisasi maupun lintas organisasi tidak akan berhasil apalagi jika organisasi tersebut tergabung dalam suatu wadah yang dikenal dengan istilah pemerintahan atau negara. Secara istilah administrasi negara adalah sebagai suatu kumpulan orang dalam suatu lingkungan kerja dimana orang-orang tersebut mempunyai peran dan tugas masing-masing dengan

satu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi berdasarkan kesepakatan bersama (Siagian 2002;2)

Administrasi Pemerintahan Desa adalah segenap usaha yang dilakukan Pemerintah Desa guna memenuhi dan menjamin terlaksananya kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah atasannya dan juga kegiatan dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan rumah tangga desa yang bersangkutan (Ndraha 2001; 40)

Menurut Saparin (1996:46) Administrasi Pemerintahan Desa adalah suatu kegiatan yang bersumber pada wewenang pemerintahan desa yang terdiri atas tugas-tugas kewajiban berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjalankan pemerintahan desa.

Menurut Pamudji (2001:22) menegaskan bahwa administrasi negara setidaknya memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan,
2. Meliputi ketiga cabang pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta sehubungan diantara mereka,
3. Mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan Negara dan oleh karena nya merupakan sebaian proses politik,
4. Dalam beberapa hal berbeda dengan administrasi privat atau swasta,
5. Sangat erat dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam administrasi dan manajemen pemerintahan desa bahwa administrasi ditujukan terhadap pokok dan kebijaksanaannya sedangkan manajemen ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan maksud menyelesaikan tujuan dan pelaksanaan kebijaksanaan. Peran Kepala Desa adalah faktor kunci dalam manajemen pemerintahan desa karena Kepala Desa merupakan penggerak utama manajemen pemerintahan desa. Dalam proses manajemen pemerintahan desa, Kepala Desa adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*) dan pengawasan (*controllin*).

Sedarmayanti (2004;09) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyatnya, oleh karena itu tugas dari pemerintahan adalah :

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sedangkan Kooiman dalam Sedarmayanti menuliskan bahwa dalam masyarakat modern yang dinamis yang kompleks serta sangat beragam pemerintahan memiliki tugas atau peran baru (dalam Fitra 2004:40), yaitu :

- a. Pemberdayaan interaksi sosial politik, hal ini mengandung arti penarikan diri dalam berbagai kesempatan, namun seringkali (dan pada saat yang sama) hal ini berarti mengambil tanggung jawab untuk mengkoordinasi interaksi sosial politik untuk mengatur dirinya.
- b. Pembentukan dan pemeliharaan kelangsungan berbagai jenis dan bentuk “*co-arrangement*” dimana permasalahan nya tanggung jawabnya dan tindakan kolektifitas ditanggung bersama.

Manifestasi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah Pelaksanaan pemerintahan yang merupakan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan pemerintahan melalui penyediaan fasilitas pelayanan, penyimpangan pelayanan manusia untuk memberikan pelayanan, penyiapan prosedur untuk mekanisme pelayanan (Sedarmayanti 2004:36)

- a. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintahan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana, terus menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dari masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ini diwujudkan melalui pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya baik fisik maupun nonfisik.
- b. Pelaksanaan kamtibmas dan perlindungan yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

## Fungsi Organisasi

Organisasi memiliki beberapa fungsi utama. Mungkin pada organisasi yang berbeda hal-hal tersebut akan diorganisasi secara berbeda pula.

Menurut Purta (2012;05) mengemukakan fungsi tujuan organisasi adalah:

- a. Pedoman bagi kegiatan, melalui penggambaran hasil akhir di waktu yang akan datang memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang harus dan tidak dilakukan.
- b. Sumber legitimasi, melalui pembenaran kegiatan-kegiatannya. Akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.
  - 1) Standart pelaksanaan, memberikan standart bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi organisasi).
  - 2) Sumber motivasi, karena sering memberikan insentif bagi anggota.
  - 3) Dasar rasional pengorganisasian, karena antara tujuan dan struktur organisasi saling berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan.

### 3. Konsep Manajemen

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan persepektif yang berbeda-beda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, pelaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketata pengurusan, administrasi dan sebagainya.

Teori dan prinsip manajemen memberikan kemudahan dalam menentukan hal-hal yang harus dikerjakan untuk dapat secara efektif menjadi seorang manajer, yaitu orang yang menjalankan fungsi manajemen.

Adapun focus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locus berbagai bentuk dan jenis organisasi, hal ini memandang manusia sebagai sumberdaya strategis pada setiap organisasi oleh

karena itu setiap fungsi manajemen mengacu kepada peranan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi.

Menurut Terry (2009;9) manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu-individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan-tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing, dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian 2003;5)

Selain itu menurut Hasibuan Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk suatu tujuan tertentu(dalam Mulyono 2008;18).

Menurut Harold dan Cyril O'Doneel Manajamen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian (dalam Hasibuan. 2006;3)

Manajemen adalah suatu rangkaian aktivitaas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien (Griffin 2004;8)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan operasional atau maksud-maksud yang nyata (Brantas, 2009;4)

Menurut The Liang Gie Manajemen sebagai seni perencanaan, pengkordinasian, pengarahan, pengkordinasian dan pengontrolan terhadap sumberdaya manusia dan alam untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (dalam Mulyono. 2008;17).

Massie menyatakan Suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapau tujuan bersama. Proses tersebut mencakup tehnik-tehnik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas yang dimaksud (dalam Arsyad. 2003;1)

Menurut Himan mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama(dalam Manulung. 2001;3).

Menurut Stoner dan Freeman manajemen sebagai suatu proses untuk membuat aktivitas terselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain(dalam Wibowo. 2007;2).

Erni dan Kurniawan (2010;6) mengatakan bahwa manajemen pada dasarnya merupakan senni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat ;

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya. Atau sebagaimana menurut griffin, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi.

- b. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut Marry Parker Follet manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain(dalam Erni dan Kurniawan, 2010;5).

George R. Terry menyebutkan fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- a. *Plainning* (perencanaan)
- b. *Organising* (pengorganisasian)
- c. *Actuating* (penggerak)
- d. *Controlling* (pengendalian dan pengawasan)

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata, manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” pengelolaan, sedang pelaksanaannya disebut manajer atau pengelola (Terry dan Leslie W. Rue,2003;1)

Yang menyatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian diperlukan konsep manajemen sumber daya manusia (Darwis 2009;5)

Selain itu menurut Stoner manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, dan menggunakan semua sumber daya manusia untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan(dalam Handoko. 2003;8).

Luther gulick mendefenisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama lain lebih bermanfaat bagi kemanusiaan(dalam Handoko. 2003;11)

Menurut Siswanto (2013;8) manajemen merupakan suatu ilmu karena didalam manajemen diaplikasikan langkah-langkah metode ilmiah tertentu. Langkah-langkah metode ilmiah yang diaplikasikan dalam manajemen tersebut adalah ;

- a. Observasi, rumusan permasalahan
- b. Akumulasi dan klarifikasi fakta tambahan yang baru
- c. Generalisasi
- d. Rumusan hipotesis
- e. Testing dan vertifikasi

Dari berbagai pengertian manajemen yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah sebagian suatu proses, serangkaian tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang mengarah kepada pencapaian sasaran tertentu melalui orang lain. Dan demikian, manajer adalah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan serangkaian kegiatan/tindakan tersebut, maka dibutuhkan pilar-pilar sebagai tiang penjaga atau sering disebut sebagai fungsi manajemen, bagaimana menjalankan pilar ini maka orang yang menjalankannya disebut manajer.

#### 4. Konsep Pelaksanaan Program

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka terlebih dahulu mendefinisikan pelaksanaan dan program, agar lebih jelas mengenai pengertian pelaksanaan program itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997: 308), pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2006: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau *outcomes*. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat

berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **5. Konsep Penyuluh Perikanan**

Istilah penyuluhan pada dasarnya diturunkan dari kata “Extension” yang dipakai secara meluas dibanyak kalangan. Penyuluhan berasal dari kata dasar “Suluh” yang berarti pemberi terang ditengah kegelapan. Menurut Zakaria (2006, dalam Deptan, 2010:27) penyuluhan perikanan adalah upaya pemberdayaan pembudidaya beserta keluarganya melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan kemandirian agar mereka mau dan mampu, sanggup berswadaya memperbaiki /meningkatkan daya saing usahanya, kesejahteraan sendiri serta masyarakatnya.

Dalam UU RI No. 16, tentang Sistem Penyuluhan Perikanan, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K), tahun 2006 disebutkan bahwa penyuluh adalah perorangan warga Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan di bidang perikanan, baik merupakan penyuluh PNS, swasta, maupun swadaya. Adapun yang menjadi tugas pokok penyuluhan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan perikanan, sehingga penyuluh dituntut mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

penyuluh di lapangan dengan mitra kerja pembudidaya yang berperan sebagai fasilitator.

Penyuluhan adalah sistem penyuluhan perikanan merupakan seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama (pelaku kegiatan perikanan) dan pelaku usaha melalui penyuluhan. Tujuan penyuluhan adalah mengubah perilaku (pengetahuan, ketrampilan, dan sikap) pembudidaya agar dapat berpembudidaya lebih baik (*better farming*), berpembudidaya lebih menguntungkan (*better business*), hidup lebih sejahtera (*better living*), dan bermasyarakat lebih baik (Deptan, 2010:27).

Supartha (2005:19) mengatakan bahwa untuk meningkatkan perilaku kegiatan perikanan diperlukan pendekatan penyuluhan sistem kegiatan perikanan, yang materi penyuluhannya mencakup keseluruhan aspek teknis produksi, aspek manajemen kegiatan perikanan, dan aspek manajemen hubungan sistem kegiatan perikanan dengan wawasan industri, terutama etika kesisteman, kemampuan kewirausahaan, dan kepribadian sebagai pengusaha kegiatan perikanan agar para pelaku sistem kegiatan perikanan dapat memiliki persepsi dan sikap yang sama tentang: visi, misi, etika bisnis, tujuan, sasaran, dan rencana kerja bersama yang dirumuskan dengan cara terbuka. Metode penyuluhan maupun media komunikasi yang digunakan agar lebih beragam, inovatif, dan kreatif sesuai dengan kebutuhan sasaran penyuluhan.

Penyuluhan sistem kegiatan perikanan adalah jasa layanan dan informasi kegiatan perikanan yang dilakukan melalui proses pendidikan non formal untuk pembudidaya dan pihak-pihak terkait yang memerlukan, agar kemampuannya

dapat berkembang secara dinamis untuk menyelesaikan sendiri setiap permasalahan yang dihadapinya dengan baik, menguntungkan, dan memuaskan. Mutu jasa layanan dilihat dari segi keterpercayaan (*realibility*), keterjaminan (*assurance*), penampilan (*tangiability*), kepemerhatian (*empaty*), dan ketanggapan (*responsiveness*) (Supartha, 2005:19).

Supari (2002:119) mendefinisikan kegiatan perikanan sebagai unit bisnis yang berbasis agroindustri dan terkait dengan produk agroindustri mulai dari hulu (*up stream*), ditingkat usaha pembudidaya (*on farm*), hilir (*down stream*) kegiatan perikanan, dan layanan perdagangan. Kegiatan perikanan merupakan bentuk pendekatan pembangunan sektor perikanan yang dikembangkan di Indonesia dewasa ini. Kegiatan perikanan yang dilihat sebagai suatu sistem yang holistik, merupakan suatu proses yang utuh dari proses perikanan di daerah hulu sampai ke daerah hilir, atau proses dari penyediaan input sampai pemasaran. Arsyad, dkk (dalam Soekartawi, 2003:77) menjelaskan bahwa kegiatan perikanan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan perikanan dalam arti luas.

Mata rantai kegiatan kegiatan perikanan yang dipandang sebagai suatu konsep sistem dapat dibagi menjadi empat subsistem yaitu:

- (1) subsistem produksi,
- (2) subsistem pengolahan,
- (3) subsistem pemasaran, dan
- (4) subsistem lembaga penunjang.

Keempat subsistem ini mempunyai kaitan yang erat antara salah satu subsistem berpengaruh terhadap subsistem lainnya. Supartha (2005) mengatakan bahwa uraian dari subsistem kegiatan perikanan antara lain subsistem perusahaan kegiatan perikanan hulu berfungsi menghasilkan dan menyediakan sarana produksi perikanan terbaik agar mampu menghasilkan produk pembudidaya yang berkualitas, melakukan pelayanan yang bermutu kepada pembudidaya, memberikan bimbingan teknis produksi, memberikan bimbingan manajemen dan hubungan sistem kegiatan perikanan, memfasilitasi proses pembelajaran atau pelatihan bagi pembudidaya, menyaring dan mensintesis informasi kegiatan perikanan praktis untuk pembudidaya, mengembangkan kerjasama bisnis (kemitraan) yang dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak. Subsistem perusahaan budidaya sebagai produsen perikanan berfungsi melakukan kegiatan teknis produksi agar produknya dapat dipertanggungjawabkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Mampu melakukan manajemen kegiatan perikanan secara baik agar proses produksi menjadi efisien sehingga mampu bersaing di pasar.

Pembudidaya/pembudidaya umumnya memerlukan penyuluhan, informasi kegiatan perikanan, teknologi, dan inovasi lainnya dalam proses produksi, bimbingan teknis atau pendampingan agar pembudidaya dapat melakukan proses produksi secara efisien dan bernilai tambah lebih tinggi. Subsistem perusahaan kegiatan perikanan hilir, berfungsi melakukan pengolahan lanjut (baik tingkat primer, sekunder maupun tersier) untuk mengurangi susut nilai atau meningkatkan mutu produk agar dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, serta berfungsi memperlancar pemasaran hasil melalui perencanaan sistem pemasaran

yang baik. Subsistem jasa penunjang (penyuluhan, penelitian, informasi kegiatan perikanan, peraturan, kredit modal, dan transportasi) secara aktif ataupun pasif berfungsi menyediakan layanan bagi kebutuhan pelaku sistem kegiatan perikanan untuk memperlancar aktivitas perusahaan dan sistem kegiatan perikanan. Agar semua pelaku sistem kegiatan perikanan mendapat peluang yang adil dalam memperoleh keuntungan, maka cara pandang terhadap kegiatan perikanan secara makro artinya aktivitas kegiatan perikanan adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa subsistem, dimana antara satu subsistem dengan subsistem lainnya saling terkait dan terpadu untuk memperoleh nilai tambah yang maksimal bagi para pelakunya, (Saragih, 1998 dalam Supartha, 2005).

Keberhasilan pengembangan kegiatan perikanan sangat ditentukan oleh keharmonisan kerjasama tim sumber daya manusia yang berada pada semua subsistem kegiatan perikanan. Kunci keberhasilan kerjasama tim adalah SDM yang terlibat dalam kegiatan perikanan, disamping memiliki perilaku yang cukup di bidang pekerjaannya sendiri (*on job skill*), harus juga mempunyai perilaku positif tentang posisi dirinya dalam perusahaan kegiatan perikanan, dan posisi perusahaannya dalam integrasi vertikal kegiatan perikanan, serta wawasan ekonomi secara makro (*macro behavior*) (Saragih, 1998 dalam Supartha, 2005).

Konsep perusahaan dan sistem kegiatan perikanan dimunculkan untuk mengubah paradigma pembudidaya /pembudidaya, bahwa pembudidaya/pembudidaya adalah manajer perusahaan kegiatan perikanan yang berkedudukan setara dengan perusahaan kegiatan perikanan yang berada di hulu maupun di hilir. Para Pembudidaya agar mulai dari memperhatikan kebutuhan pasar, bersinergi

dengan perusahaan kegiatan perikanan lain untuk memproduksi barang yang dibutuhkan pasar. Jika hal ini dapat dilakukan, maka tercapailah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya. Untuk mengubah sikap dan perilaku itulah, diperlukan penyuluhan perikanan dengan pendekatan penyuluhan sistem kegiatan perikanan serta penyuluhan profesional (Supartha, 2005).

Lebih lanjut Supartha (2005) perilaku kegiatan perikanan yaitu :

- (1) aspek perilaku teknis produksi,
- (2) manajemen kegiatan perikanan
- (3) aspek perilaku hubungan

## **6. Konsep Perikanan**

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat krisis ekonomi, perairan sektor perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. Akan tetapi ironisnya, sektor perikanan selama ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha, padahal bila sektor perikanan di kelola secara serius akan memberikan kontribusi yang lebih besar serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Indonesia terutama masyarakat nelayan (Mulyadi, 2007:15).

Pengertian perikanan menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, pasal 1 ayat (1) yaitu perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai

dengan pemasaran yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan izin usaha perikanan menurut peraturan daerah Propinsi Riau nomor 8 tahun 2002 pasal 1 huruf (g) menyebutkan usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial baik di laut, danau, sungai dan kolam.

Sementara menurut peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten Kampar pasal 72 menjelaskan dinas perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perikanan. Dinas perikanan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, pasal 73 mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang Perikanan
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kampar
- c. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan teknis dibidang perikanan
- d. Pelaksanaan pemberian pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Kabupaten
- e. Melakukan pengelolaan, pembinaan usaha dan pelayanan perizinan dibidang perikanan

- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap pendayagunaan sumber daya perikanan
- g. Melaksanakan kerja sama dibidang pengembangan perikanan
- h. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan/ peralatan dan organisasi dinas
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya
- j. Pengelolaan UPT Dinas.

## 7. Teori Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220).

Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”. Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup: kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali. Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai.

Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa

orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluative. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif – yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluative. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan” (Bardach, E. 2008).

Pendapat lain mengenai evaluasi disampaikan oleh Arikunto dan Cepi (2008:2), bahwa: Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Sedangkan Uzer (2003 : 120), mengatakan bahwa: Evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan.

Menurut Djaali dan Pudji (2008:1), evaluasi dapat juga diartikan sebagai

“proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi”. Menurut Thomas R. Dye dalam Kencana (2007:86) kebijakan pemerintahan adalah “is whatever governmentst choose to do or not to do” adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Dye mengatakan bahwa bila pemerintahan memiliki untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintahan atau pejabat pemerintah saja.

Kemudian Chandler dan Plano mendefinisikan kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecakan masalah publik atau pemerintah (Harbani Pasolong, 2010:39). Sedangkan menurut Ndraha (2011:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Kebijakan publik adalah seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk

mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak. (Young & Quinn, dalam Suharto, 2005;44).

Menurut Dunn (2001;105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badab atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan;
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada;
3. Penetapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instnsi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan;
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Sedangkan menurut Nugroho (2006;25) kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan atau kehidupan publik, bukan kehidupan seorang atau golongan. Selanjutnya menurut Edwards dan Sharkansky mengatakan bahwa kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan. (Wahab,2008:52).

Selain itu menurut N. Dunn (2003:29) juga menyatakan kriteria evaluasi yaitu;

1. Efektifitas;
2. Efisiensi;
3. Responsivitas
4. Ketepatan.

Salah satu cara untuk mewujudkan fungsi pemerintahan, pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah, sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil dan Cristine, 2003:190). Menurut Eulau dan prewitt (dalam Awang 2010:26) menyatakan ada beberapa komponen kebijakan:

1. Niat (*intentions*)
2. Tujuan (*goals*)
3. Rencana atau usulan (*plans or proposal*)
4. Program
5. Keputusan atau pilihan (*decision or choices*)
6. Pengaruh (*effects*).

Kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah-masalah publik (dalam Awang, 2010;26). Dalam mengukur pelaksanaan kebijakan tersebut Hugh Heglo dalam N.Dunn (2003;29) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan (*a course of*

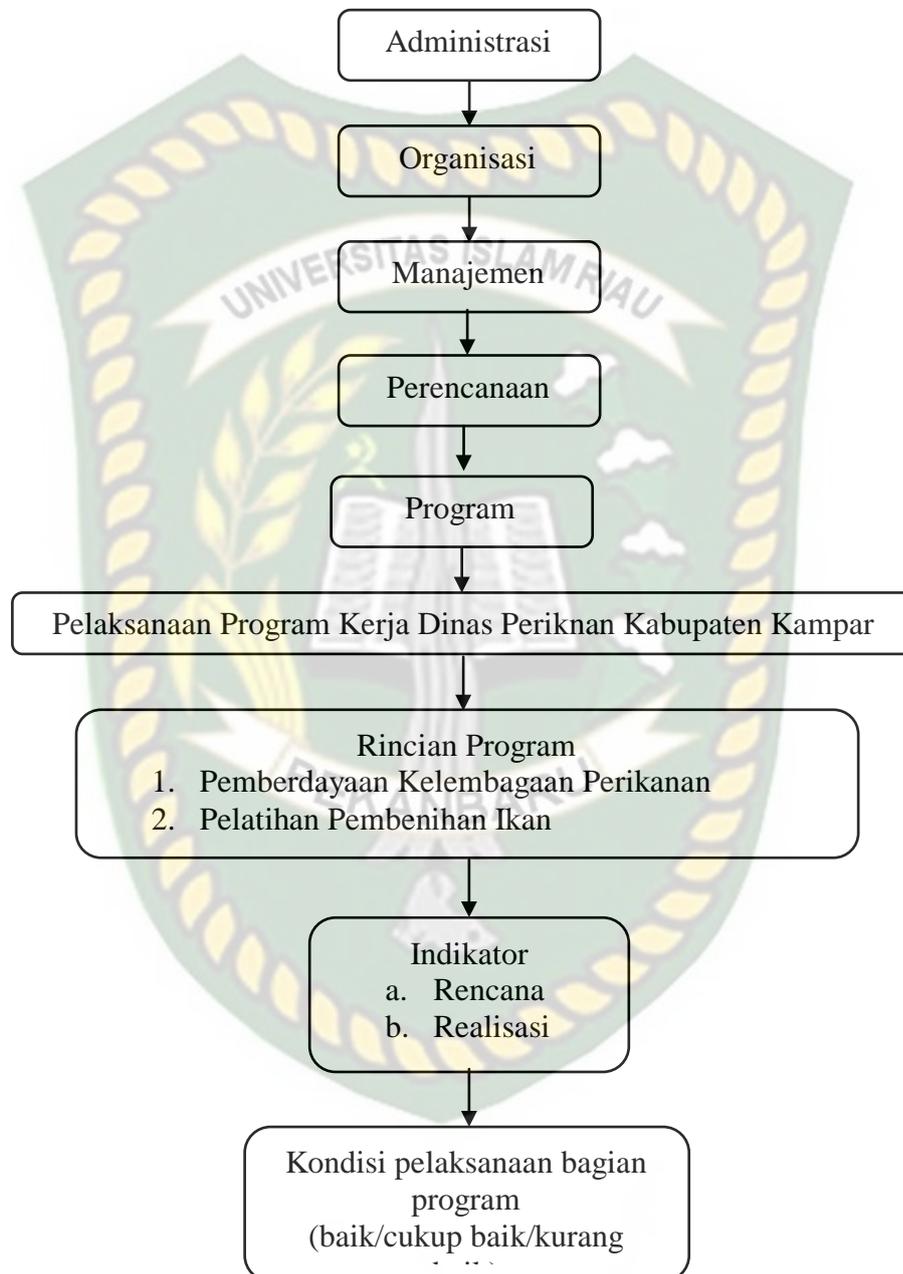
*action intended to accomplish some end*). Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi ukuran kebijakan yaitu:

1. Tujuan yaitu tujuan yang dikehendaki untuk dicapai,
2. Rencana atau proposal yaitu alat atau cara untuk mencapai tujuan,
3. Program atau cara tertentu untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan untuk mencapai tujuan,
4. Keputusan yaitu tindakan yang diambil untuk menentukan dan mengevaluasi program,
5. Dampak (effect) yaitu ditimbulkan dari suatu program dalam masyarakat

#### **B. Kerangka Pikir**

Otonomi Daerah merupakan hak dan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki potensi pengembangan budidaya air tawar terutama budidaya kolam, keramba dan jaring apung. Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang merupakan Instansi Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan, tentu memiliki peran dalam Peningkatan Potensi dibidang perikanan. Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 6 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah pasal 37. Dari penjelasan diatas kerangka pikir dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016)



Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2020.

### C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah teoritis di atas maka dapat disimpulkan suatu dugaan sebagai berikut “diduga bahwa dengan terlaksananya program peningkatan sistem penyuluhan perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar maka akan dapat meningkatkan potensi perikanan di Kabupaten Kampar”.

### D. Konsep Operasional Variabel

Untuk memberikan kesatuan pendapat maka perlu kiranya penulis mengemukakan konsep operasional yang merupakan konsep yang di pakai dalam proses penelitian yang di maksud untuk menterjemahkan konsep teoritis yang ada sehingga tercipta suatu pengertian dalam penelitian ini. Oleh karna itu penulis akan menjelaskan pemakaian konsep-konsep penelitian untuk menghindari kekeliruan dalam pemakaian konsep yang meliputi:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
3. Manajemen disini adalah bagaimana seorang pemimpin mampu mengatur dan mengendalikan semua kegiatan kearah tujuan yang telah ditetapkan.
4. Peranan adalah suatu bentuk partisipasi yang merujuk pada hal yang harus dijalankan/ dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

### E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016)

Konsep	Variabel	Indikator	Dimensi (subindikator)	Skala Ukuran
1	2	3	4	5
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. (Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004)	Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	1. Rencana dan realisasi program pemberdayaan kelembagaan perikanan	a. Menyusun data potensi wilayah kerja b. Membantu penumbuhan, penguatan, dan pengembangan kelompok perikanan di wilayah kerja c. Menyusun materi penyuluhan perikanan d. Membantu meningkatkan kapasitas pelaku utama/usaha perikanan e. Membantu meningkatkan akses pelaku utama/usaha perikanan terhadap informasi pasar, teknologi, sarana dan prasarana, dan pembiayaan	Ordinal
		2. Rencana dan realisasi program Pelatihan Pembenihan Ikan	a. Melaksanakan pelatihan pembenihan ikan kepada pelaku utama perikanan b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama/usaha perikanan	Ordinal

			tentang pembenihan ikan c. Meningkatkan produktivitas pembenihan ikan melalui pelatihan pembenihan ikan.	
--	--	--	---	--

Sumber : Modifikasi Penulis Dan Teori, 2018

#### F. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada variabel dan masing-masing indikator dalam menilai peranan Dinas Perikanan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 67% - 100%.
- Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.
- Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada tabel rekapitulasi pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 43%.

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator variabel adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, dikatakan:

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 43%.

b. Melakukan program pengembangan budidaya perikanan, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 43%.

c. Melakukan pengembangan sistem penyuluhan perikanan, dikatakan :

Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 66% - 100%.

Cukup Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 34% - 66%.

Kurang Baik : Apabila hasil rata-rata penilaian responden pada kategori baik dengan persentase antara 0% - 43%.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe survey deskriptif. Karena peneliti bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi yang detail terhadap objek peneliti. Dan itu dilakukan dengan mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi, sehingga akan diperoleh penggambaran yang sangat jelas dari hasil analisisnya.

Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### B. Lokasi Penelitian

Menurut Bungin (2007:80) lokasi penelitian menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang di observasi. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahunan 2016.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan yang menjadi objek penelitian berupa makhluk hidup, sistem, prosedur, fenomena – fenomena dan lain-lainnya dalam

suatu lokasi atau ruang lingkup tertentu. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelembagaan Perikanan, serta Tenaga Penyuluh Perikanan Kabupaten Kampar.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.

Tabel III.1 Jumlah Populasi Dan Sampel Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Kabupaten Kampar (Studi Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan Tahun 2016)

No	Jenis	Jumlah
1	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar	1 Orang
2	Tenaga Penyuluh Perikanan Kabupaten Kampar	25 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>26 Orang</b>

Sumber : Data olahan penelitian 2018

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini di gunakan dengan cara teknik sensus yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Sumber Daya Perikanan dan Kelembagaan Perikanan, pengujian dijadikan sampel. Pada pemilik usaha perikanan digunakan teknik pengambilan sampel secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan memilih siapa yang bisa memberikan informasi secara tepat yang di butuhkan peneliti.

### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil observasi visual, dilakukan untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan pada responden responden yang terkait program kerja peningkatan system penyuluh perikanan kabupaten Kampar.
2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen dokumen, catatan catatan, laporan laporan, maupun arsip arsip resmi yang diperoleh dari Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Kuisioner yaitu menyusun daftar pertanyaan secara tertulis sesuai dengan pokok permasalahan penelitian yang disebarkan kepada responden terpilih untuk diisi berdasarkan alternative jawaban yang ada
3. Interview atau wawancara mendalam yaitu mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
4. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang

diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.

5. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data data sekunder, dan dengan cara membaca berbagai literatur atau buku buku, karangan dan dokumen lain serta catatan catatan lainnya yang relevan dalam penulis ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu atau pelengkap yang diperoleh melalui dokumen dokumen atau catatan catatan resmi yang dibuat oleh sumber sumber yang berwenang yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Data ini diperoleh dengan mengumpulkan dan mencatat laporan laporan, dokumen dokumen, catatan- catatan surat lokal harian dan nasional dan data online.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah data dan informasi terkumpul dalam penelitian ini, lalu data tersebut dipisahkan dan dikelompokkan berdasarkan masing-masing indikator variabel, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi yang disajikan dalam bentuk tabulasi dilengkapi dengan nilai skor. Yang mana apabila datanya telah terkumpul, maka lalu diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol menurut Arikunto (2006:239).

## BAB IV

### DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN

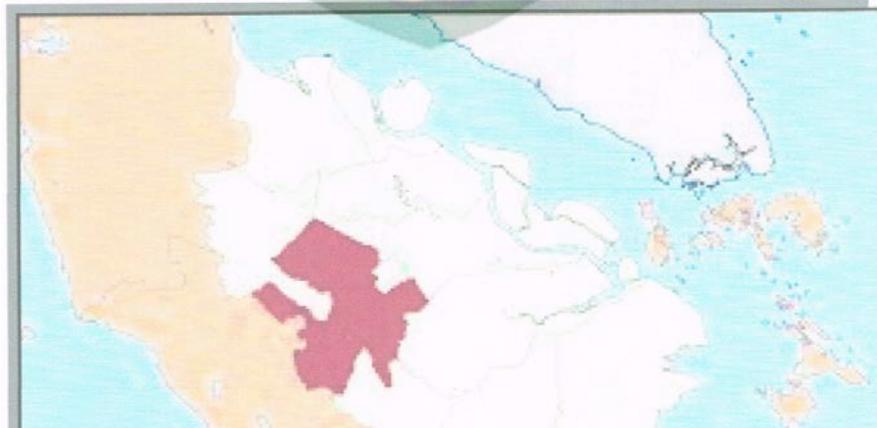
#### A. Gambaran Umum Dinas Perikanan Kabupaten Kampar

##### 1. Keadaan Alam

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°27'00" Lintang selatan dan 100°28'30" - 100°14'30" Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantang Singingi
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak

**Gambar IV. 1 Peta Kabupaten Kampar**



Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

1. Sungai Kampar yang panjangnya lebih kurang 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 m. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Kuok, Salo, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.
2. Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya lebih kurang 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

## **B. Visi dan Misi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

### **1. Visi**

Visi adalah gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Visi memberikan jiwa ke mana organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Mengacu pada konsepsi visi diatas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menetapkan visi yang selaras, dengan keadaan lingkungan serta perubahan-perubahan yang ada, yaitu:

**“Terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai Pusat Agribisnis Perikanan Air**

**Tawar yang Lestari dan Mampu Mensejahterahkan Insan Perikanan yang**

**Sejahtera pada Tahun 2016”**

## 2. Misi

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar merumuskan beberapa konsepsi tugas yang harus diemban yaitu berupa rumusan atau pernyataan misi. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan memahami keberadaan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Misi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara efektif dan efisien sesuai tugas pokok dan fungsinya.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi perikanan air tawar yang berwawasan lingkungan dan mengembangkan usaha perikanan secara merata di setiap daerah Kabupaten Kampar sesuai dengan potensi yang dimiliki
3. Menumbuh kembangkan usaha penyediaan sarana produksi perikanan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau
4. Meningkatkan upaya diversifikasi usaha budidaya, pasca panen dan peningkatan mutu produk hasil perikanan yang dapat memberikan nilai tambah produk serta dapat bersaing di pasaran.

## **C. Program dan Kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

### **1. Program**

Adapun program Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tahun 2016 terdiri dari:

1. Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
5. Pengembangan budidaya perikanan
6. Pengembangan sistem penyuluh perikanan
7. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
8. Perlindungan sumber daya hayati perikanan
9. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan

### **2. Kegiatan**

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) pasal 2)., dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Sementara itu Paralel dengan pembuatan RKPD, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD di jadikan dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara. Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Kampar Tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD.

Sesuai dengan amanat tersebut maka Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2016. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ini merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar akan dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Perikanan Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan daerah, yang disinkronisasikan dengan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah. Adapun kegiatan Dinas Perikanan kabupaten Kampar tahun 2016 terdiri dari:

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa kebersihan kantor
3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan jasa alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga harian lepas
12. Pembangunan gedung kantor
13. Pengadaan pakaian kerja lapangan
14. Pemeliharaan rutin atau berkala kendaraan dinas atau operasional
15. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
16. Penyusunan laporan capaian kerja dan iktisan realisasi kinerja SKPD
17. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
18. Penyusunan program, monitoring dan evaluasi kegiatan
19. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan

20. Pembinaan dan pengembangan perikanan
21. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan
22. Pengembangan keramba ikan
23. Optimalisasi balai benih ikan (BBI) lokal Bangkinang
24. Optimalisasi laboratorium penyakit ikan dan kualitas air
25. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya (penunjang DAK)
26. Pembinaan ekonomi kerakyatan
27. Penerapan inovasi dan teknologi tepat guna perikanan
28. Penumbuhan dan pengembangan usaha perbenihan
29. Pengembangan perikanan budidaya kolam
30. Pemberdayaan kelembagaan perikanan
31. Pelatihan pembenihan ikan
32. Promosi potensi dan hasil perikanan
33. Optimalisasi setra pengolahan hasil pasca panen perikanan air tawar
34. Gerakan sosialisasi gemar makan ikan
35. Penetrasi pasar dan temu mitra konsumen
36. Penumbuhan dan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
37. Pengembangan POKWASMAS
38. Pengembangan dan pembinaan perikanan tangkap

#### **D. Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

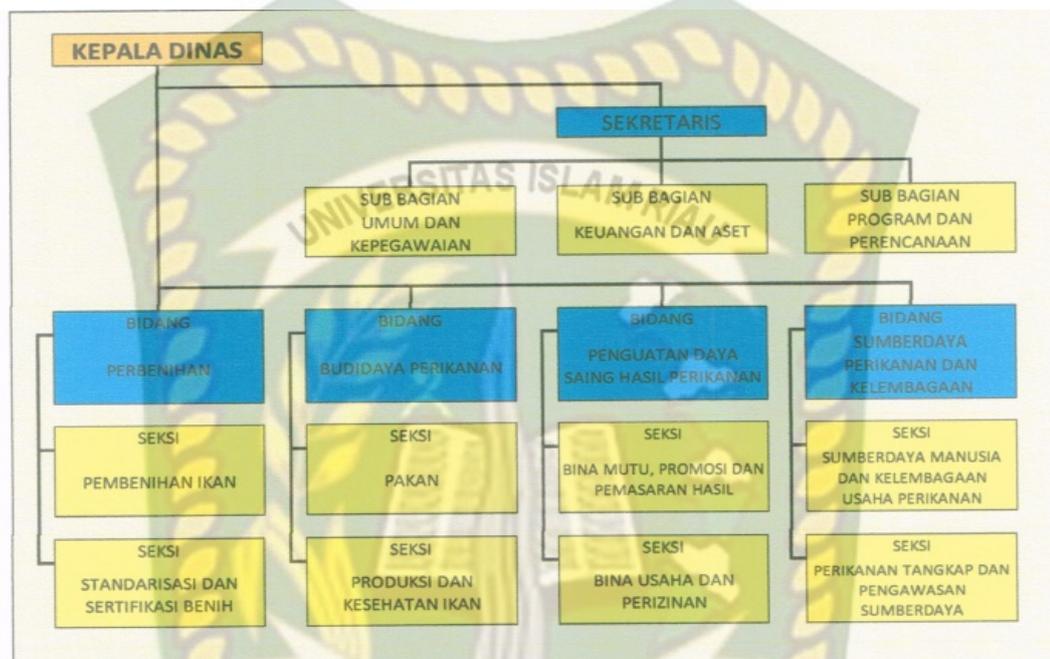
Dinas Perikanan Kabupaten Kampar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam menjalankan perannya di bidang perikanan, secara structural dibagi dalam 1 sekretariat dan 4 bidang. Pembagian tugas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Asset
  - c. Sub Bagian Program dan Perencanaan
2. Bidang Perbenihan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembenihan Ikan
  - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Benih
3. Bidang Budidaya Perikanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pakan Ikan
  - b. Seksi Produksi dan Kesehatan Ikan
4. Bidang Penguatan Daya Sang Hasil Perikanan, terdiri dari:
  - a. Seksi Bina Mutu, Promosi dan Pemasaran Hasil
  - b. Seksi Bina Usaha dan Perizinan
5. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelembagaan, terdiri dari:

- a. Seksi Sumberdaya manusia dan Kelembagaan Usaha Perikanan
- b. Seksi Perikanan Tangkap dan Pengawasan Sumberdaya

**Gambar IV.2 Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**



Untuk mendukung tugas secara teknis, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar memiliki 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yaitu:

- a. UPTD Balai Benih Ikan Lokal (BBI) Lokal
- b. UPTD Laboratorium Penyakit Ikan dan Kualitas Air
- c. UPTD Pengolahan Hasil Perikanan
- d. UPTD Wilayah I
- e. UPTD Wilayah II

Meliputi wilayah Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu, dan Kecamatan Tapung Hilir.

- f. UPTD Wilayah III

Meliputi wilayah Kecamatan Kampar, Kampa, Kapar Utara, Rumbio Jaya, Tambang dan Siak Hulu.

g. UPTD Wilayah IV

Meliputi wilayah Kecamatan Perhentian Raja, Kampar Kiri Hilir, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri, Gunung Sahilan dan Kampar Kiri Hulu.

### E. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan perikanan, maka Dinas Perikanan Kabupaten Kampar didukung oleh potensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 146 orang personel (Data sampai Mei 2017). Untuk informasi jabatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.1 Formasi Jabatan Tahun 2017**

No	Jabatan	Eselon	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala Dinas	II/b	1	
2.	Sekretaris	III/a	1	
3.	Kabid	III/b	4	
4.	Kepala Seksi	IV/a	8	
5.	Kasubag	IV/a	3	
6.	Ka. UPTD	IV/a	7	
7.	Kasubag. TU UPTD	IV/b	7	

**Sumber: Data olahan penelitian, 2019**

### F. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Kampar menempati gedung kantor yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin SH No. 59 Bangkinang. Status lahan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar adalah Tanah Hak Pakai asal tanah Negara Ex. Cabang Dinas dari Dinas Perikanan Darat Propinsi Daerah Tingkat I Riau Seluas 26.000 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Prof. M. Yamin SH Nomor 09 Bangkinang. Di lahan ini terdapat beberapa

gedung permanen yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar antara lain:

1. Bangunan kantor Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebanyak 2 unit
2. Bangunan Hatchery Balai Benih Ikan seluas 2 unit
3. Gudang arsip sebanyak 1 unit
4. Aula Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebanyak 1 unit
5. Mess Dinas Perikanan Kabupaten Kampar sebanyak 2 unit
6. Kolam Pendederan, kolam induk, kolam pembesaran dan kolam reservoir sebanyak 27 unit
7. Rumah Jaga Balai Benih Ikan sebanyak 2 unit
8. Laboratorium Penyakit Ikan dan Kualitas Air sebanyak 1 unit
9. Mushola, sebanyak 1 unit

Disamping itu adanya Balai Benih Ikan di desa Sipungguh Kecamatan Salo dan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan di desa Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar.

#### **G. Landasan Hukum**

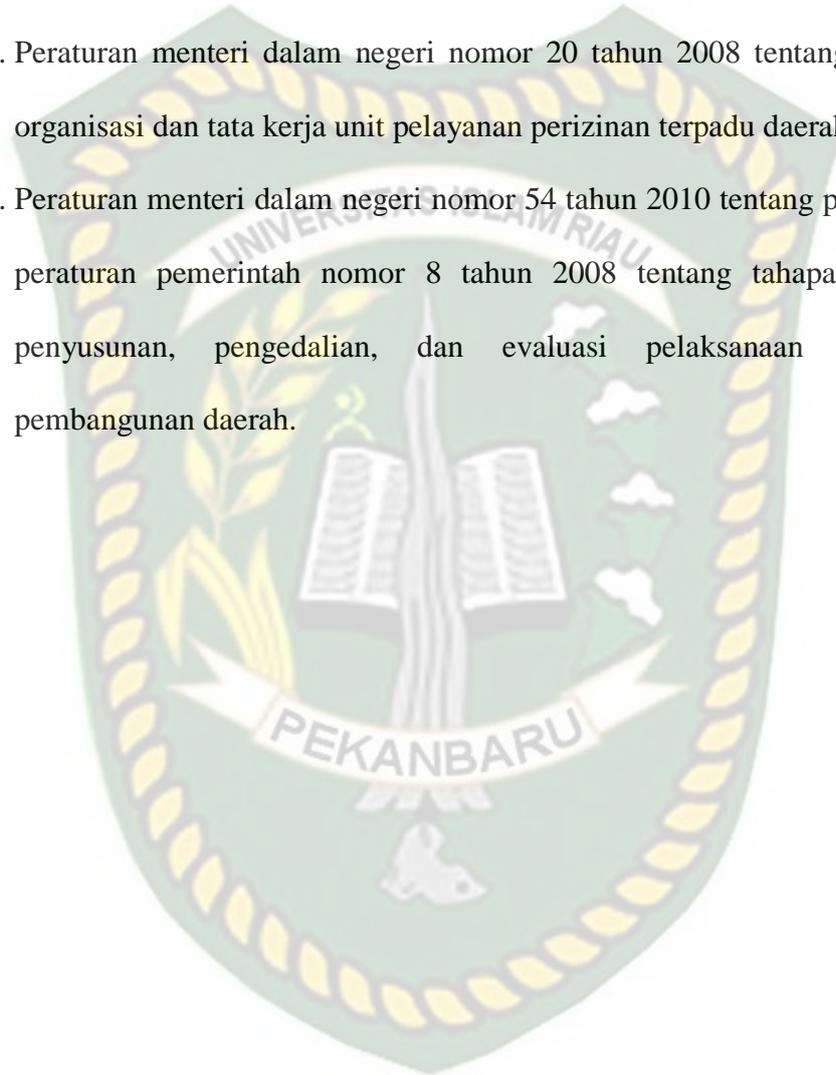
Dasar hukum penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Tahun 2015 adalah:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang sistem pemerintahan daerah telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang

penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang.

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
5. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025.
6. Instruksi presiden nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
8. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah propinsi, dan pemerintah daerah kabupaten / kota (lembaran negara republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4737)
9. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
10. Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
11. Peraturan menteri daam negeri Republik Indonesia nomor 6 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penyusunan penetapan standar pelayanan minimal

12. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu daerah
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah narasumber terpilih berdasarkan populasi dan sampel penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan alat pengumpulan data berupa wawancara, dan pegawai atau tenaga penyuluh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam bentuk kuesioner atau penyebaran angket. Berdasarkan pengelompokan responden berdasarkan alat pengumpulan data diatas, maka secara keseluruhan responden di dalam penelitian ini berjumlah 26 orang dengan klasifikasi berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut:

**Tabel V.1 : Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin terhadap Penelitian tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

No	Klasifikasi Responden berdasarkan Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	19	73%
2	Perempuan	7	27%
	Jumlah	26	100%

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019*

Berdasarkan tabel data di atas, diketahui bahwa frekuensi (jumlah suatu unsur) responden laki-laki sebanyak 19 orang atau sebesar 73% dari jumlah responden dan responden perempuan sebanyak 7 orang atau sebesar 27% dari jumlah responden. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa secara umum, responden dalam penelitian ini adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki.

Klasifikasi responden berdasarkan tingkat usia dalam penelitian ini diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel V.2 : Klasifikasi Responden berdasarkan Usia terhadap Penelitian tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

No	Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Usia	Frekuensi	Persentase
1	14-20	3	12%
2	21-27	5	19%
3	28-34	11	42%
4	35-41	3	12%
5	42-48	4	15%
Jumlah		26	100%

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019*

Dari tabel data diatas, frekuensi responden pada tingkatan usia 14-20 tahun dan 35-41 tahun adalah masing-masing sebanyak 3 orang atau sebesar 12% dari jumlah responden, tingkat usia 21-27 tahun 5 orang atau sebesar 19%, tingkat usia 28-34 tahun sebanyak 11 orang atau sebesar 42%, tingkatan usia 42-48 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 15% dari jumlah responden.

Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir, diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel V.3 : Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan terhadap Penelitian tentang Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

NO	Klasifikasi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Akhir	Frekuensi	Persentase
3	SMA sederajat	5	24%
4	S1	19	68%
5	S2	2	8%
Jumlah		26	100%

*Sumber : Data Olahan Lapangan, 2019*

Berdasarkan tabel data V.3 di atas diketahui frekuensi responden pada tingkat pendidikan SMA sederajat sebanyak 5 orang atau sebesar 24% dari jumlah responden, tingkat pendidikan S1 (sarjana) sebanyak 19 orang atau sebesar 68% dari jumlah responden, dan tingkat pendidikan S2 (pasca sarjana) sebanyak 2 orang atau sebesar 8% dari jumlah responden.

## **B. Variabel dan Indikator Variabel**

Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Indikator dari variabel tersebut diukur berdasarkan jawaban dari 25 orang responden yang berasal dari kuisioner penelitian.

### **1. Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

Fokus pada penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan dari program kerja itu sendiri terutama pada kegiatan program pengembangan sistem penyuluhan perikanan, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti serta peninjauan melalui dokumen-dokumen dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar terutama pada tahun 2016 mendapatkan sedikitnya 10 kelompok yang belum terealisasi pada kegiatan pemberdayaan lembaga perikanan serta pelatihan pembenihan ikan.

Melaksanakan program-program pembangunan perikanan yang tertuang dalam Renstra, Dinas perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 06 Tahun 2008 Tentang rincian tugas seksi pelatihan dan penyuluhan mempunyai rincian tugas yaitu merumuskan dan melaksanakan pengenalan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, instansi pemerintah maupun pihak swasta, tentang

pelaksanaan dan pemberdayaan program. Berikut ini program dan kegiatan kerja yang menjadi perhatian khusus pada penelitian ini:

**Tabel V.4 Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Kampar Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan Tahun 2016**

Program Kegiatan	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Realisasi
Program Pengembangan Sistem Penyuluh Perikanan	- Pemberdayaan Lembaga Perikanan	- Terwujudnya kelembagaan perikanan yang kuat mandiri dan berdaya saing	40 Kelompok	30 Kelompok
	- Pelatihan Pembenihan Ikan	- Terlaksananya pelatihan pembenihan ikan	40 Kelompok	30 Kelompok

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kampar 2016.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar pada program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016 dimana pada kegiatan pemberdayaan lembaga perikanan ditargetkan pencapaian kinerja sebanyak 40 kelompok tetapi pencapaian hanya pada 30 kelompok. Kelompok yang dimaksud adalah sesuai dengan program dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang mengagendakan kelompok-kelompok usaha perikanan warga seperti kelompok keramba patin, kelompok ikan nila, dan kelompok-kelompok ikan lainnya. Adapun penyebab belum terlaksananya sesuai dengan kegiatan diatas disebabkan oleh beberapa hal seperti perubahan siklus dan musim yang tidak menentu serta perubahan cuaca yang tidak merata, sehingga kelompok-kelompok usaha perikanan menjadi berkurang akibat tidak bisa

menghandel usahanya sehingga pada tahun 2016 tersebut hanya 30 kelompok usaha perikanan yang tersisa dan diluar dari target program tersebut.

Kemudian, pada kegiatan pelatihan pembenihan ikan ditargetkan pencapaian kinerja sebanyak 40 kelompok tetapi pencapaian hanya pada 30 kelompok. Akibat dari ketidak telitian para pengusaha perikanan dibawah kendali dinas perikanan Kabupaten Kampar tersebut membuat kelompok-kelompok perikanan terus berkurang. Rendahnya pencapaian pada program kegiatan program pengembangan sistem penyuluh perikanan diakibatkan oleh sedikitnya tenaga penyuluh perikanan yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.

Dinas Perikanan Kabupaten Kampar telah menetapkan keputusan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang berbunyi setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2) pasal (2)), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kampar tahun 2016 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD. Rencana Kerja Dinas

Perikanan Kabupaten Kampar akan dijadikan sebagai pedoman rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Perikanan Kabupaten Kampar yang telah ditetapkan pada prioritas pembangunan daerah, yang disinkronisasikan dengan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

## 2. Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan

Peneliti telah melakukan rekapitulasi tanggapan responden dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner langsung terhadap tenaga penyuluh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. Tanggapan kelima item pertanyaan tersebut yang ditanggapi oleh para responden dalam penelitian ini, disajikan pada responden dalam penelitian ini, disajikan pada tabel V.4 berikut:

**Tabel V.5 : Tanggapan Responden terhadap Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan Kelembagaan Perikanan**

No	Item Penilaian	Alternatif Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Menyusun data potensi wilayah kerja	12 48%	8 32%	5 20%	25 100%
2	Membantu penumbuhan, penguatan, dan pengembangan kelompok perikanan di wilayah kerja	11 44%	11 44%	3 12%	25 100%
3	Menyusun materi penyuluhan perikanan	8 32%	9 36%	8 32%	25 100%
4	Membantu meningkatkan kapasitas pelaku utama/usaha perikanan	13 52%	7 28%	5 20%	25 100%

5	Membantu meningkatkan akses pelaku utama/usaha perikanan terhadap informasi pasar, teknologi, sarana dan prasarana, dan pembiayaan	9 36%	13 52%	3 12%	25 100%
<b>Jumlah</b>		53 42%	48 38%	24 19%	125 100%

*Sumber : Data olahaan lapangan, 2019*

Dari pengukuran terhadap indikator variabel sebagaimana diuraikan pada tabel V.4, diketahui bahwa indikator variabel penelitian berupa rencana dan realisasi program pemberdayaan kelembagaan perikanan yang memiliki ukuran dengan nilai tertinggi adalah penilaian baik, yaitu sebesar 53 atau sebesar 42%, selanjutnya dengan penilaian cukup baik, yaitu sebesar 48 atau 38% dan dengan penilaian tidak baik, yaitu sebesar 24 atau 19%. Dari hal ini maka disimpulkan bahwa pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ditinjau dari rencana dan realisasi program pemberdayaan kelembagaan perikanan di wilayah Kabupaten Kampar memiliki penilaian yang baik.

Menanggapi hasil jawaban yang telah dikumpulkan melalui jawaban kuesioner tersebut, peneliti melakukan wawancara langsung terhadap Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang diwakilkan oleh Kasubag Perencanaan dan Data, bapak Bambang Kridianto S.Pi tentang sistem landasan hukum yang diterapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelembagaan perikanan di wilayah Kabupaten Kampar, dengan jawaban sebagai berikut:

“Rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan ini. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

laporan yang telah kami sajikan secara akuntabilitas. Kemudian mengenai landasan hukum dalam penyusunan rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ini adalah berdasarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025.” (Wawancara dengan Kasubag Perencanaan dan Data, Bambang Kridianto S.Pi 15 Januari 2019)

Berdasarkan jawaban yang diberikan diatas, dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan pelaksanaan program rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 – 2025. Adapun tinjauan utama terkait dengan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar selama 5 tahun berturut-turut dan perkiraan target di tahun 2016.

Kemudian, peneliti menanyakan tentang tugas penyuluhan tenaga penyuluh teknis (TPT) Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang didapat berdasarkan hasil wawancara langsung dengan Kasubag Perencanaan dan Data, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja Tenaga Penyuluh Teknis (TPT) Perikanan tahunan dan bulanan sesuai kebutuhan sasaran di wilayah kerja berdasarkan kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dan pemberdayaan masyarakat Kampar.
2. Membantu penumbuhan, penguatan, dan pengembangan kelompok perikanan di wilayah kerja.

3. Menyusun materi penyuluhan perikanan sesuai kebutuhan sasaran penyuluhan
4. Membantu meningkatkan kapasitas pelaku utama atau usaha perikanan
5. Membantu meningkatkan akses pelaku utama atau usaha perikanan terhadap informasi pasar, teknologi, sarana prasarana, dan pembiayaan
6. Membantu mewujudkan usaha perikanan yang fleksibel dan bankable
7. Membantu meningkatkan produktivitas dan skala usaha pelaku utama atau usaha
8. Membuat laporan kinerja bulanan

### **3. Rencana dan Realisasi Program Pelatihan Pembenihan Ikan**

Pengukuran terhadap indikator rencana dan realisasi program pelatihan pembenihan ikan dalam penelitian ini terdiri lima item pertanyaan yang dinilai.

Lima item pertanyaan yang dinilai tersebut terdiri dari:

1. Melaksanakan pelatihan pembenihan ikan kepada pelaku utama atau usaha perikanan di wilayah Kabupaten Kampar
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama atau usaha perikanan tentang pembenihan ikan di wilayah Kabupaten Kampar
3. Meningkatkan produktivitas pembenihan ikan melalui program pembenihan ikan di wilayah Kabupaten Kampar
4. Melaksanakan program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melalui program pembenihan ikan
5. Meningkatkan sasaran kerja yang sudah dicapai sebelumnya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melalui program pembenihan ikan

Berdasarkan kelima indikator tersebut diminta kepada responden untuk memberikan jawaban mengenai yang disampaikan melalui kuesioner tersebut. Untuk lebih jelasnya, tanggapan kelima item pertanyaan tersebut yang ditanggapi oleh para responden dalam penelitian ini, disajikan pada tabel V.5 berikut:

**Tabel V.6 : Tanggapan Responden terhadap Rencana dan Realisasi Program Pelatihan Pembenuhan Ikan**

No	Item Penilaian	Alternatif Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Melaksanakan pelatihan pembenuhan ikan kepada pelaku utama atau usaha perikanan di wilayah Kabupaten Kampar	10 40%	11 44%	4 16%	25 100%
2	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku utama atau usaha perikanan tentang pembenuhan ikan di wilayah Kabupaten Kampar	12 48%	7 28%	6 24%	25 100%
3	Meningkatkan produktivitas pembenuhan ikan melalui program pembenuhan ikan di wilayah Kabupaten Kampar	3 12%	16 64%	6 24%	25 100%
4	Melaksanakan program kerja atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melalui program pembenuhan ikan	12 48%	7 28%	6 24%	25 100%
5	Meningkatkan sasaran kerja yang sudah dicapai sebelumnya oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar melalui program	7 28%	13 52%	5 20%	25 100%

	pembenihan ikan				
	<b>Jumlah</b>	44 35%	54 43%	27 22%	125 100%

*Sumber : Data olahan lapangan, 2019*

Dari pengukuran terhadap indikator variabel sebagaimana diuraikan pada tabel V.5, diketahui bahwa indikator variabel penelitian berupa rencana dan realisasi program pelatihan pembenihan ikan yang memiliki ukuran dengan nilai tertinggi adalah dengan penilaian cukup baik, yaitu sebesar 54 atau 43%, selanjutnya dengan penilaian baik, yaitu sebesar 44 atau 35%, dan dengan penilaian tidak baik, yaitu sebesar 27 atau 22%. Bersasarkan hal ini maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Kampar ditinjau dari efisiensi memiliki penilaian yang cukup baik.

Menanggapi hasil jawaban tersebut, peneliti juga menanyakan terkait hal yang berhubungan rencana dan realisasi program pelatihan pembenihan ikan tersebut, adapun pertanyaan yang diajukan yaitu mengenai fungsi dari penyuluhan ikan, jawaban dari Kasubag Perencanaan dan Data adalah sebagai berikut:

1. Sebagai motivator, fasilitator, mediator, dan dinamistor dalam proses pemberdayaan pelaku utama dan usaha perikanan
2. Sebagai agen pemberdayaan masyarakat pelaku utama dan pelau usaha perikanan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan di bidang penangkapan, budidaya, pengolahan dan pemasaran
3. Sebagai agen perubahan masyarakat pelaku utama dan usaha perikanan dalam membangun sektor perikanan melalui fasilitasi akses terhadap sumber informasi pasar, teknologi dan pembiayaan

Disamping itu, tenaga penyuluh perikanan ini juga mempunyai fungsi lainnya yaitu sebagai program pendampingan, yang terdiri dari program pendampingan perikanan budidaya, pendampingan perikanan tangkap, dan pendampingan penguatan daya saing produk pengolahan perikanan. Adapun masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. Program Pendampingan Perikanan Budidaya

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Penyuluh Teknis (TPT) Perikanan menyelenggarakan fungsi pendampingan pada program-program budidaya dari Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dengan mengacu kepada:

- a. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana serta sarana kegiatan budidaya
- b. Peningkatan mutu induk dan benih unggul serta pembenihan ikan lainnya
- c. Peningkatan produksi dan usaha perikanan budidaya
- d. Penerapan teknologi perikanan budidaya
- e. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
- f. Ketersediaan pakan ikan
- g. Program prioritas perikanan budidaya

2. Program Pendampingan Perikanan Tangkap

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Penyuluh Teknis (TPT) Perikanan menyelenggarakan fungsi pendampingan pada:

- a. Pengelolaan sumber daya ikan standardisasi alat penangkapan ikan
- b. Standardisasi sampan perikanan dan alat penangkapan ikan

- c. Peningkatan usaha penangkapan ikan
  - d. Program prioritas perikanan tangkap
3. Program Pendampingan Penguatan Daya Saing Produk Pengolahan Perikanan

Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Penyuluh Teknis (TPT) Perikanan menyelenggarakan fungsi pendampingan pada:

- a. Pembinaan mutu dan dipersifikasi produk pengolahan
- b. Penguatan promosi produk pengolahan perikanan
- c. Peningkatan sistem logistic produk pengolahan perikanan
- d. Peningkatan keberlanjutan usaha pengolahan perikanan
- e. Program prioritas kegiatan daya saing produk pengolahan perikanan

#### **4. Rekapitulasi Penilaian Terhadap Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

Rekapitulasi penilaian terhadap pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar dalam penelitian ini yang menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu dalam program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016, disajikan pada tabel berikut:

**Tabel V.7 : Rekapitulasi Penilaian terhadap Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar**

No	Indikator Variabel	Katagori Penilaian			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Tidak Baik	
1	Rencana dan Realisasi Program Pemberdayaan	53 42%	48 38%	24 19%	125 100%

	Kelembagaan Perikanan				
2	Rencana dan Realisasi Program Pelatihan Pembenihan Ikan	44 35%	54 43%	27 22%	125 100%
	Jumlah	97	102	51	250
	Rata-rata	48,5	51	25,5	125
	Persentase	40%	43%	17%	100%

**Sumber : Data olahan lapangan, 2019**

Dari tabel V.6, diketahui bahwa dari kedua indikator terhadap pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tentang program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016, secara umum penilaian yang diperoleh adalah pada kategori penilaian cukup baik, yaitu nilai rata-rata 51 atau sebesar 43%. Selanjutnya dengan kategori penilaian baik, yaitu dengan nilai rata-rata 48,5 atau sebesar 40% dan dengan kategori penilaian tidak baik, yaitu dengan nilai rata-rata 25,5 atau sebesar 17%. Berdasarkan hal ini maka kesimpulan yang diperoleh adalah Pelaksanaan Program Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tentang program pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016 sudah terlaksana dengan cukup baik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang sudah disajikan pada bab sebelumnya, dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar tentang pengembangan sistem penyuluh perikanan tahun 2016 sudah terlaksana dengan cukup baik.
2. Faktor penghambat terlaksananya program kerja yang kurang optimal dikarenakan keberadaan dan penyebaran penyuluh yang belum merata dikarenakan jumlah penyuluh PNS hanya 4 orang yang hanya mencakup 4 kecamatan, sedangkan kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar berjumlah 21 kecamatan. Sehingga faktor SDM yang menjadi penghambat kurang optimalnya pelaksanaan program kerja yang dicanangkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran kepada Dinas Perikanan Kabupaten Kampar antara lain sebagai berikut:

1. Agar dapat mempertahankan atau meningkatkan indikator variabel berupa efektivitas dalam pelaksanaan program kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kampar.
2. Agar dapat mengevaluasi tentang SDM yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kampar yang mana dalam hal ini sangat minim

tenaga dan sangat diperlukan untuk pengembangan dalam pelaksanaan program kerja yang lebih baik kedepannya.

3. Kepada peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik penelitian yang sama hendaknya penelitian ini dapat dijadikan acuan atau perbandingan yang relevan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2002. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta
- Chomsa, Achmad Fachrurrozi, 2011. *Pengertian dan Fungsi Organisasi, Telekomunikasi*. Sumatra Selatan.
- Darmadi dan Damai, S. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Laksbang
- Herujinto, Yayat M. 2001. *Dasar- Dasar Manajemen*. Grasindo. Jakarta.
- Hamim, 2003. *Adminitrasi, Organisasi Dan Manajemen, Suatu Ilmu, Teori, Konsep dan Aplikasi*, Pekanbaru: UIR Press
- Haris Budiyo, Amirullah, 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, Melayu SP. 2007. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hasibuan, Melayu SP. 2016. *Manajemen dasar, pengertian, dan masalah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta
- Mulyono, 2008. *Manajemen administrasi & organisasi pendidikan*. AR-RUZZ MEDIA
- Moekijat, 1998. *Analisis Jabatan*. Bandung : Penerbit Mandar Maju
- Moris, Zulkifli. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen Suatu Bacaan Pengantar*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing
- Nurmasari, Zulkifli. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing

- Nawawi, Zaidin. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: Radja Grafindo Persada
- Pamudji, 2001. *Ekologi Administrasi Negara*. Bina Aksara. Jakarta.
- Santoso, 2008, *Metedologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian. SP. 2009 *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian. SP. 2008 *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Bumi Aksara
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Silalahi. 2011. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru
- Sugiyono, 2015, *Statistika untuk penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Sugandi, Yogi Suprayogi.2011. *Administrasi Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suryo. 2012, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Thoha, Miftah, 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*. Jakarta: Prenada Media Gruop
- Terry R. George. 2000. *Prinsip-Prinsip Majemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wirawan, 2011. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zulkifli,2005.*Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Pers
- Zuriah,Nurul.2005. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*.PT Bumi Aksara. Malang.

### **Peraturan Perundang Undangan**

- Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang Undang Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati Barru Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah Kabupaten Kampar



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau